

The Influence of Regional Financial Management Information System (SIPKD) and Fixed Asset Management on the Quality of Local Government Financial Reports in City and Regency Regional Governments in West Java Province

Kamilia Lestari* & Winwin Yadiati

Master of Accounting Faculty of Economics and Business, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Abstract

The background of this research is that there are still problems in the quality of financial reports presented by local governments, as can be seen from the fact that WTP's opinion has not been obtained on local government financial reports. This study aims to determine how the influence of regional financial management information systems and fixed asset management on the quality of local government financial reports in cities and districts in West Java Province, either partially or simultaneously. The factors tested in this study are the local financial management information system and fixed asset management as independent variables, while the quality of local government financial reports as the dependent variable. The research method used in this research is the verification method. The sampling technique used in this study is a non-probability sampling technique with purposive sampling technique, so that the sample in this study is 135 respondents, each of which consists of a regional head, regional secretary, and 3 employees of the finance department. The analytical method used in this study is multiple linear regression analysis using SPSS Version 25.00. Based on the results of the research partially and simultaneously, it shows that the regional financial management information system and fixed asset management affect the quality of local government financial reports. In addition, the magnitude of the influence of regional financial management information systems and fixed asset management on the quality of local government financial reports is 65.0%.

Keywords: Regional Financial Management Information System, Fixed Asset Management, Quality of Local Government Financial Reports.

1. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan titik awal adanya otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dilaksanakannya otonomi daerah yaitu meningkatkan pemerintahan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal tersebut demi terciptanya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (Baldrick, 2015).

Kedua landasan Undang-Undang tersebut merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta telah membuka jalan bagi pelaksanaan reformasi sektor publik di Indonesia. Salah satu pelaksanaan reformasi sektor publik yang dilakukan diantaranya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta bertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya dengan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas

* Corresponding author.

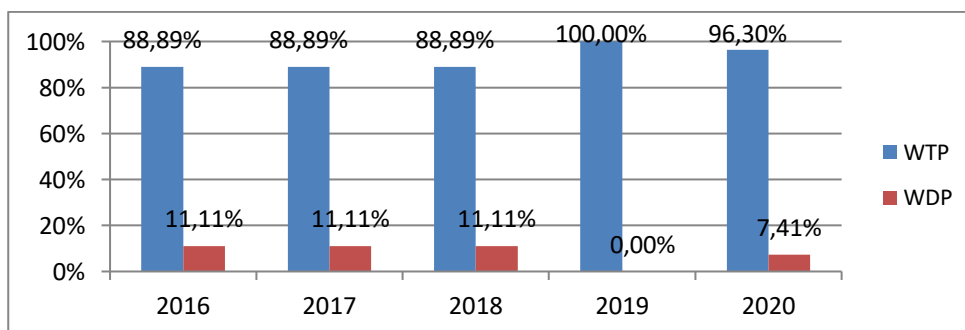
E-mail address: : kamilialestari@gmail.com

publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada kepada publik dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2021).

Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan sendiri merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah didasarkan atas standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Pemerintah, 2010).

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat tercermin dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Representasi kewajaran laporan keuangan dituangkan dalam bentuk opini dengan mempertimbangkan kriteria kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan (Ratifah & Ridwan, 2014). Berkenaan dengan opini yang dikeluarkan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah terdapat empat macam opini sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yaitu : (1) Wajar Tanpa Pengecualian, (2) Wajar dengan Pengecualian, (3) Tidak Wajar, dan (4) Tidak Memberikan Pendapat.

Pada kenyataannya dari hasil pemeriksaan BPK tidak semua pemerintah daerah sudah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan informasi yang dikutip dari artikel www.jabar.tribunnews.com tahun 2019 menyebutkan bahwa tiga Kabupaten di Jabar gagal raih opini WTP untuk laporan tahun 2018. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat yaitu Sahat MT Panggabean mengatakan dari 28 pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat terdapat 25 pemerintah daerah yang LKPDnya memperoleh opini WTP, sementara 3 pemerintah daerah lainnya yakni Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Bandung Barat (Fatimah, 2019). Di bawah ini akan disajikan data persentase peroleh opini WTP dan WDP atas LKPD pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020 yaitu sebagai berikut :



Gambar 1. Grafik Persentase Perolehan Opini WTP dan WDP Atas LKPD Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

Berdasarkan gambar 1 di atas bahwa pada tahun 2016-2018 menunjukkan persentase jumlah Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan opini WTP sebesar 88,89% atau sebanyak 24 Kota dan Kabupaten, sedangkan yang mendapatkan opini WDP sebesar 11,11% atau sebanyak 3 Kota dan Kabupaten. Pada tahun 2019 menunjukkan bahwa semua Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat mendapatkan opini WTP. Namun pada tahun 2020 menunjukkan persentase jumlah Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan opini WTP sebesar 96,30% atau sebanyak 26 Kota dan Kabupaten, sedangkan yang mendapatkan opini WDP sebesar 7,41% atau sebanyak 2 Kota dan Kabupaten. Di bawah ini akan disajikan data opini audit atas LKPD Pemerintah Provinsi dan beberapa Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat periode 2016-2020 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa opini atas LKPD yang diperoleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016-2020 mendapatkan opini WTP secara berturut-turut. Hal tersebut berbanding terbalik dengan opini atas LKPD yang diperoleh Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang beberapa diantaranya pada tahun 2016-2020 mendapat opini WDP. Pada tahun 2020 terdapat 2 Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang mengalami penurunan kualitas opini atas LKPD dari tahun 2019 mendapatkan opini

WTP, namun pada tahun 2020 mendapatkan opini WDP dinataranya Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Indramayu. Dari uraian di atas menunjukan bahwa kualitas laporan keuangan yang ditunjukan pemerintah daerah masih belum optimal. Beberapa faktor yang diduga menyebabkan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tidak mendapatkan opini WTP diantaranya dikarenakan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah yang belum optimal.

Tabel 1. Opini Audit Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat

No	Entitas Pemda	Opini Audit LKPD				
		TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019	TA 2020
1	Provinsi Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Bandung Barat	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP
3	Kab. Cianjur	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
4	Kab. Indramayu	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
5	Kab. Subang	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
6	Kab. Tasikmalaya	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
7	Kota Bandung	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Pemda Provinsi Jabar

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Elsye et al., 2016). Laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Oleh karena itu penting bagi pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kualitas laproan keuangan pemerintah daerah. Maka untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan sistem informasi pengelolaan keungan daerah (Soleh & Rohmansjah, 2014, p. 67).

Berdasarkan informasi yang diperoleh terdapat beberapa kasus terkait dengan pengelolaan keuangan daerah pada Pemkab Bandung Barat sepertihalanya informasi yang dikutip dari artikel www.pikiran-rakyat.com tahun 2018 menyebutkan bahwa belum optimalnya kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat berkaitan dengan masih rendahnya realisasi serapan anggaran belanja daerah. Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyisakan angka yang cukup signifikan. Sisa lebih penggunaan anggaran tahun 2017 mencapai Rp 304 miliar mengalami peningkatan dari tahun 2016 yang mencapai Rp 166 miliar. Hal itu menjadi sorotan DPRD Kabupaten Bandung Barat, sebab besarnya Silpa menunjukkan tidak optimalnya kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Samsul Maarif selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat mengungkapkan Silpa mengindikasikan perencanaan program yang tidak matang oleh pemerintah daerah, akibatnya anggaran tidak terserap maksimal sehingga pembangunan menjadi tersendat (Sari, 2018).

Informasi lainnya yang dikutip dari artikel www.pikiran-rakyat.com tahun 2019 menyebutkan bahwa gagalnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam memperoleh opini WTP tahun 2018 akibat terganjal penggelapan dana Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan sebesar Rp 7,7 miliar di RSUD Lembang. Bupati Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yaitu Aa Umbara Sutisna mengungkapkan kegagalan meraih WTP dikarenakan mantan Direktur RSUD Lembang dan bendaharanya yang membawa kabur uang BPJS total nilai mencapai Rp7,7 miliar untuk anggaran tahun 2017 dan 2018. Akibat kasus tersebut, Pemkab harus mengembalikan uang negara yang dikorupsi itu. Namun selain masalah di atas, Pemkab Bandung Barat selalu mendapatkan opini WDP secara berturut-turut sejak tahun 2012 akibat masalah aset daerah (Sari, 2019).

Selain itu kasus terbaru terkait kasus korupsi yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat yang dikutip dari artikel www.mediaindonesia.com tahun 2020 menyebutkan bahwa penyidikan kasus korupsi kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat senilai Rp2,134 miliar yang sudah mangkrak 10 tahun. Satreskrim Polres Cimahi menyelidiki tindak pidana korupsi (tipikor) pengadaan lahan untuk kompleks perkantoran Pemkab Bandung Barat seluas 19,53 hektar yang dibayai APBD Kabupaten Bandung Barat pada 2009. Kanit Tipikor Polres Cimahi yaitu Iptu Herman Saputra mengungkapkan tersangka mantan Kabag Umum dan Setda

Pemkab Bandung Barat terbukti menggelembungkan harga lahan untuk kantor Pemkab Bandung Barat yang menyebabkan kerugian negara kurang lebih Rp2,134 miliar (Gunawan, 2020).

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan salahsatu alat pengendalian pemerintah daerah dan merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan kualitas implementasi berbagai regulasi bidang pengolahan keuangan daerah. Oleh karena itu perlu didukung dengan penyempurnaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien guna menghasilkan laporan informasi keuangan dengan akurat dan tepat waktu. Jadi semakin tinggi efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan (Yusup, 2016). Penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan berpengaruh pada peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Lestari & Hastuti, 2020).

Selain itu sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan aset adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah. Salah stau aset yang dikelola oleh pemerintah daerah yaitu aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (Indonesia, 2009, p. 49).

Berdasarkan informasi yang dikutip dari artikel www.pikiran-rakyat.com tahun 2019 menyebutkan bahwa salah satu permasalahan aset tetap di pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat yaitu adanya aset sebanyak 1.444 bidang yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat bersifat ilegal atau tidak resmi, karena aset-aset tersebut tidak memiliki sertifikat dan saat ini hanya berpegang pada surat pelimpahan aset yang berasal dari daerah induk yakni Kabupaten Bandung dan banyaknya aset tetap yang belum tertib penyalurannya, pertanggungjawaban belanja, pencatatan dan inventarisasi yang masih belum sesuai (Sari, 2019).

Informasi lainnya yang dikutip dari artikel www.bandungbaratpos.com tahun 2020 menyebutkan bahwa emerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tahun 2019. Namun salah anggota DPRD yaitu Rahmat mengatakan Pemkab Bandung Barat untuk tidak terlalu euforia atas raihan WTP yang ditetapkan oleh BPK dikarenakan selama 12 tahun Bandung Barat belum pernah WTP itu di sebab karena persoalan aset yang belum pernah dapat terselesaikan kalau tidak salah ada ribuan aset yang belum tersertifikasi. Meskipun tahun 2019 Pemkab Bandung Barat mendapat WTP, namun bukan berarti persoalan aset ini sudah bisa terselesaikan dengan baik (Nasir, 2020)

Selain itu infotmasi yang dikutip dari artikel www.bandungbaratpos.com tahun 2021 bahwa Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat yaitu Sundaya menyebutkan masih banyak aset daerah milik Pemkab Bandung Barat yang belum diinventarisasi dan tidak dikelola dengan baik. Sundaya mengungkapkan ribuan aset milik Pemkab Bandung Barat rawan beralih ke pihak lain, hal ini dikarenakan aset tersebut tersebar di wilayah KBB dan masih belum bersertifikat. Kendala tersebut akibat Pemkab Bandung Barat belum memiliki atau membuat perencanaan kebutuhan aset yang digunakan sebagai rujukan dalam pengadaan aset daerah. Pihaknya berencana akan menyusun SOP pengelolaan aset agar masalah administrasi menjadi tidak menjadi hambatan akibat terkendala anggaran. Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah KBB yaitu Yusep Ahmad Darajat menyebutkan dari total aset yang dimiliki Pemkab Bandung Barat sebanyak 1.677 bidang, hanya 65 bidang yang bersertifikat (Gimnastiar, 2021)

Pengelolaan aset bertujuan untuk membantu suatu organisasi dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara efektif dan efisien. Meliputi petunjuk cara perancangan aset, pengoperasian/penggunaan aset sampai pada penghapusan aset serta resiko yang mungkin ada selama siklus hidup aset (Yusuf, 2010, p. 198). Kegiatan inventarisasi aset dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Mengacu pada prinsip good governance bahwa pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan yang tranparan dan akuntabel. Tujuannya agar semua yang dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat termasuk aset tetap berupa barang milik daerah (BMD). Semakin baik pengelolaan aset daerah, maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Anshari & Syofyan, 2016)

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh (Yusup, 2016) menunjukan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian

yang dilakukan oleh (Sundari, 2018) menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2016) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali dikarenakan masih banyaknya Pemerintah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang masih mendapatkan opini WDP, bahkan beberapa diantaranya mengalami penurunan kualitas opini audit dari WTP menjadi WDP.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk menentukan pengaruh sistem adalah deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif terhadap studi dampak. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 27 Kota dan Kabupaten, dengan menggunakan sampel jenuh Kriteria yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu responden penelitian berjumlah 5 orang yang terdiri dari kepala daerah, sekretaris daerah, dan 3 pegawai bagian keuangan. Teknik analisis data adalah dengan menggunakan analisis regresi untuk melakukan perhitungan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X terhadap Y. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SPSS 25 for windows (software statistik produk dan layanan) dan EXCEL. Selanjutnya hipotesis yang telah diajukan dapat dijabarkan dalam uji statistik. Untuk mengetahui pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas pelaporan keuangan digunakan uji-t. Pemeriksaan kualitas data menunjukkan bahwa instrumen penelitian efektif dan reliabel.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

3.1.1. Uji Validitas

Tabel 2. Validitas Variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Butir Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
P1	0,893	0,169	Valid
P2	0,800	0,169	Valid
P3	0,775	0,169	Valid
P4	0,976	0,169	Valid
P5	0,969	0,169	Valid
P6	0,980	0,169	Valid
P7	0,970	0,169	Valid
P8	0,969	0,169	Valid
P9	0,976	0,169	Valid
P10	0,839	0,169	Valid
P11	0,978	0,169	Valid
P12	0,941	0,169	Valid

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa nilai r hitung $>$ r tabel, artinya setiap pernyataan pada variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) sudah memenuhi kriteria validitas. Di bawah ini akan disajikan hasil uji validitas pada variabel pengelolaan aset tetap yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Validitas Variabel Pengelolaan Aset Tetap

Butir Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
P1	0,951	0,169	Valid
P2	0,964	0,169	Valid
P3	0,957	0,169	Valid
P4	0,854	0,169	Valid
P5	0,943	0,169	Valid
P6	0,965	0,169	Valid
P7	0,957	0,169	Valid
P8	0,928	0,169	Valid
P9	0,875	0,169	Valid
P10	0,853	0,169	Valid

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan tabel 3 menunjukan bahwa nilai r hitung $>$ r tabel, artinya setiap pernyataan pada variabel pengelolaan aset tetap sudah memenuhi kriteria validitas. Di bawah ini akan disajikan hasil uji validitas pada variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Butir Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
P1	0,936	0,169	Valid
P2	0,857	0,169	Valid
P3	0,946	0,169	Valid
P4	0,949	0,169	Valid
P5	0,865	0,169	Valid
P6	0,969	0,169	Valid
P7	0,886	0,169	Valid
P8	0,933	0,169	Valid
P9	0,904	0,169	Valid
P10	0,861	0,169	Valid
P11	0,969	0,169	Valid

Sumber: Pengolahan Data

Berdasarkan tabel 4 di atas menunjukan bahwa nilai r hitung $>$ r tabel, artinya setiap pernyataan pada variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sudah memenuhi kriteria validitas.

3.1.2. Uji Realibilitas

Tabel 5. Reliabilitas Variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Reliability Statistics			
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items		N of Items
.985		.987	12

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 5 di atas menunjukan bahwa nilai *Cronbach's Alpha Based on Standardized Items* pada variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) sebesar $0,987 > 0,70$, artinya variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) sudah memenuhi kriteria reliabel. Di bawah ini akan disajikan hasil uji reliabilitas pada variabel pengelolaan aset tetap yaitu sebagai berikut :

Tabel 6. Reliabilitas Variabel Pengelolaan Aset Tetap

Reliability Statistics			
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items		N of Items
.982		.985	10

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 6 di atas menunjukan bahwa nilai *Cronbach's Alpha Based on Standardized Items* pada variabel pengelolaan aset tetap sebesar $0,985 > 0,70$, artinya variabel pengelolaan aset tetap sudah memenuhi kriteria reliabel. Di bawah ini akan disajikan hasil uji reliabilitas pada variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Reliabilitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Reliability Statistics			
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items		N of Items
.979		.985	11

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 7 di atas menunjukan bahwa nilai *Cronbach's Alpha Based on Standardized Items* pada variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar $0,985 > 0,70$, artinya variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah udah memenuhi kriteria reliabel.

3.1.3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model sebuah regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya terdistribusi secara normal. Di bawah ini akan disajikan hasil pengujian normalitas menggunakan uji *kolmogrov smirnov* yaitu sebagai berikut:

Tabel 8. Uji Normalitas Kolmogrov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		135
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	6,50958534
Most Extreme Differences	Absolute	,074
	Positive	,064
	Negative	-,074
Test Statistic		,074
Asymp. Sig. (2-tailed)		,064 ^c

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 8 di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai signifikansi *kolmogrov smirnov* sebesar 0,064 yaitu ($0,064 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, artinya model regresi memenuhi asumsi normalitas atau data berdistribusi normal.

3.1.4. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan fenomena adanya korelasi antara variabel bebas. Di bawah ini akan disajikan hasil pengujian multikolineritas yaitu sebagai berikut :

Tabel 9. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	,659	1,518
	Pengelolaan Aset Tetap	,659	1,518

Sumber: Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 4.30 di atas menunjukkan nilai *tolerance* dari masing-masing variabel independen sebesar $0,659 > 0,1$ dan nilai VIF dari masing-masing variabel independen sebesar $1,518 < 10$. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolineritas antara variabel independen dalam model regresi.

3.1.5. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dari model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Gambar 2 menyajikan hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot*.

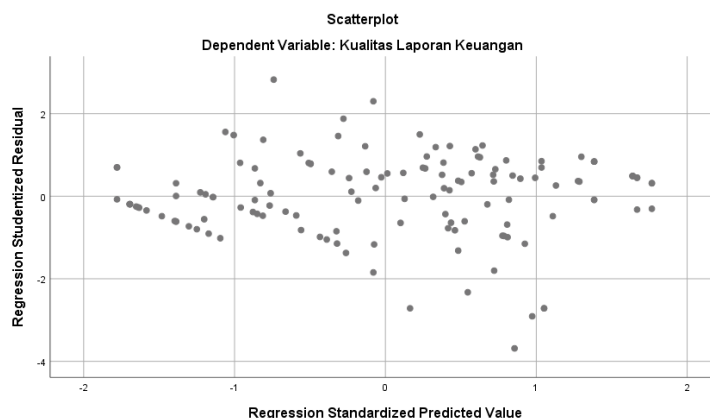
Gambar 2 menunjukkan bahwa dari grafik *scatterplot* tidak menunjukkan adanya pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Elsye et al., 2016, p. 2) Variabel sistem informasi

pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) terdiri dari 12 butir pernyataan yang terbagi ke dalam 6 indikator, yaitu indikator perencanaan terdiri dari 2 pernyataan, indikator pelaksanaan terdiri dari 2 pernyataan, indikator penatausahaan terdiri dari 2 pernyataan, indikator pelaporan terdiri dari 2 pernyataan, indikator pertanggungjawaban terdiri dari 2 pernyataan, dan indikator pengawasan terdiri dari 2 pernyataan.



Sumber: Hasil Output SPSS

Gambar 2. Uji Heteroskedastisitas

Hasil penelitian secara keseluruhan pada variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) menunjukkan bahwa nilai total skor aktual sebesar 5.323, nilai total skor ideal sebesar 8.100, nilai total persentase sebesar 65,72%, dan nilai total mean skor sebesar 3,29 termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) yang ditunjukkan di Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam kategori cukup baik.

Pada indikator perencanaan menunjukkan bahwa nilai persentase total sebesar 72,81% dan nilai mean skor total sebesar 3,64 termasuk ke dalam kategori baik. Nilai mean skor tertinggi sebesar 3,84, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa pemerintah daerah perlu untuk menyusun, mengajukan, dan menetapkan rancangan Perda tentang APBD yang dijadikan sebagai landasan untuk keseragaman peraturan keuangan daerah, sehingga dapat mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Adanya Perda tentang APBD yang dibuat oleh pemerintah daerah dapat dijadikan sebagai pedoman bagi setiap perangkat daerah (SKPD) dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan prinsip-prinsip *good government governance*. Nilai mean skor terendah sebesar 3,44, artinya masih adanya responden yang beranggapan bahwa masih ada pemerintah daerah dalam membuat RAPBD masih belum dilakukan secara rinci dan jelas berdasarkan program-program yang disusun pemerintah daerah. Pentingnya pembuatan RAPBD secara rinci dan jelas bertujuan agar *stakeholder* dapat mengetahui dan mengevaluasi kesesuaian anggaran yang disusun dengan program-program yang ditetapkan pemerintah daerah.

Pada indikator pelaksanaan menunjukkan bahwa nilai persentase total sebesar 68,67% dan nilai mean skor total sebesar 3,43 termasuk ke dalam kategori baik. Nilai mean skor tertinggi sebesar 3,81, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah salahsatunya dijasajikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Nilai mean skor terendah sebesar 3,06, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa masih adanya pemerintah daerah yang kurang melakukan verifikasi dari pihak berwenang atau yang memiliki otorisasi atas transaksi dalam pelaksanaan anggaran terkait sistem penerimaan dan pembayaran keuangan daerah. Kurang verifikasi atas setiap transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran keuangan daerah menjadi salahsatu pelaung bagi oknum tertentu untuk melakuakn tindakan kecurangan, hal tersebut terlihat dari masih adanya beberapa kasus yang terjadi di beberapa pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan keuangand aerah diantaranya kasus korupsi anggaran daerah.

Pada indikator penatausahaan menunjukkan bahwa nilai persentase total sebesar 61,85% dan nilai mean skor total sebesar 3,09 termasuk ke dalam kategori cukup baik. Nilai mean skor tertinggi sebesar 3,15, artinya mayoritas

responden beranggapan bahwa pemerintah daerah mendokumentasikan semua bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran anggaran keuangan daerah agar memudahkan dalam proses penginputan data ke dalam sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Proses pendokumentasian bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran anggaran keuangan daerah menjadi faktor penting sebagai bukti apabila adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat atau BPK atas kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Nilai mean skor terendah sebesar 3,04, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa masih adanya transaksi terkait penerimaan dan pengeluaran anggaran keuangan daerah yang belum dicatat secara lengkap dan akurat oleh pemerintah daerah. Ketidaklengkapan dan ketidakakuratan pencatatan transaksi dapat berdampak pada informasi yang yang dijadikan dalam laporan keuangan menjadi kurang andal.

Pada indikator pelaporan menunjukkan bahwa nilai persentase total sebesar 60,81% dan nilai mean skor total sebesar 3,04 termasuk ke dalam kategori cukup baik. Nilai mean skor tertinggi sebesar 3,07, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah membuat penyajian laporan keuangan menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah memudahkan pemerintah daerah khususnya pegawai bagian keuangan dalam menginput, memproses, dan mengolah semua transaksi menjadi sebuah informasi keuangan secara efektif dan efisien ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Nilai mean skor terendah sebesar 3,01, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa adanya penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah tidak menjamin penyampaian informasi keuangan menjadi lebih akurat dan tepat waktu. Hal tersebut dapat dikarenakan kurangnya ketelitian dan masih terjadi kesalahan dalam proses verifikasi, pendokumentasian, pencatatan, penginputan dan lain sebagainya membuat informasi dalam laporan keuangan menjadi kurang akurat. Selain itu, ketidaksesuaian penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan membuat masih banyaknya laporan keuangan yang harus direvisi oleh pemerintah daerah, sehingga menyebabkan masih banyaknya pemerintah daerah yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah.

Pada indikator pertanggungjawaban menunjukkan bahwa nilai persentase total sebesar 69,56% dan nilai mean skor total sebesar 3,48 termasuk ke dalam kategori baik. Nilai mean skor tertinggi sebesar 3,90, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan daerah melalui penyampaian LAKIP. Selain laporan keuangan pemerintah daerah, salahsatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah juga disajikan dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Salahsatu bentuk pertanggungjawabannya yang disampaikan dalam LAKIP diantaranya informasi mengenai kinerja penyerapan anggaran, kinerja realisasi dan target atas program-program yang dijalankan pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Nilai mean skor terendah sebesar 3,06, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa meskipun sudah adanya otorisasi terkait pemisahan wewenang dan tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah antara bagian aset dengan bagian keuangan, namun hal tersebut tidak menjadikan pengelolaan keuangan sudah dilakukan secara optimal.

Hal tersebut dikarenakan masih adanya oknum di dalam pemerintah daerah yang kurang bertanggungjawab atas wewenang dan tanggungjawab yang dimiliki dalam pelaksanaan anggaran daerah, terlihat dari masih adanya berbagai kasus keuangan daerah yang terjadi di pemerintah daerah.

Pada indikator pengawasan menunjukkan bahwa nilai persentase total sebesar 60,59% dan nilai mean skor total sebesar 3,03 termasuk ke dalam kategori cukup baik. Nilai mean skor tertinggi sebesar 3,04, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Daerah melakukan pemeriksaan secara periodik (semester) atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal ini melakukan pemeriksaannnterkait kinerja pemerintah daerah salahsatunya dalam mengelola keuangan daerah yang dilakukan secara periodik yaitu biasanya persemseter (6 bulan sekali). Nilai mean skor terendah sebesar 3,02, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa pengawasan atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan aparaturngawas intern pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat belum dilakukan secara optimal. Hal terebut terlihat dari masih adanya pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan belum dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, serta masih adanya berbagai kasus pengelolaan keuangan daerah mulai dari kinerja penyerapan anggaran yang masih rendah, kinerja pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan program yang ditetapkan pemerintah daerah, dan masih adanya berbagai kasus anggaran yang terjadi di pemerintah daerah.

3.2.2. *Pengelolaan Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat*

Pengelolaan aset atau barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah (PP No 71 Tahun 2010). Variabel pengelolaan aset tetap terdiri dari 10 butir pernyataan yang terbagi ke dalam 5 indikator, yaitu indikator inventarisasi aset daerah terdiri

dari 2 pernyataan, indikator legal audit aset daerah terdiri dari 2 pernyataan, indikator penilaian aset daerah terdiri dari 2 pernyataan, indikator optimalisasi aset daerah terdiri dari 2 pernyataan, dan indikator pengawasan dan pengendalian aset daerah terdiri dari 2 pernyataan.

Hasil penelitian secara keseluruhan pada variabel pengelolaan aset tetap menunjukkan bahwa nilai total skor aktual sebesar 4.288, nilai total skor ideal sebesar 6750, nilai total persentase sebesar 63,53%, dan nilai total mean skor sebesar 3,18 termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap yang ditunjukkan di Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam kategori cukup baik.

Pada indikator inventarisasi aset daerah menunjukkan bahwa nilai persentase total sebesar 59,93% dan nilai mean skor sebesar 3,00 termasuk ke dalam kategori cukup baik. Nilai mean skor tertinggi sebesar 3,07, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa pemerintah daerah sebagai besar sudah melakukan inventarisasi yuridis/legal dengan melakukan pencatatan status kepemilikan aset tetap milik daerah. Hal tersebut dilakukan agar aset yang dicatat sebagai milik pemerintah daerah memiliki kekuatan hukum (tersertifikasi), sehingga dapat menghindari adanya oknum yang mengklaim kepemilikan aset tersebut. Nilai mean skor terendah sebesar 2,93, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa proses pencatatan aset tetap milik daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagai bentuk inventarisasi fisik masih belum optimal lengkap dan akurat. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya kasus aset tetap milik pemerintah daerah yang belum tercatat atau belum memiliki sertifikat, sehingga masih banyaknya berbagai kasus yang terjadi terkait penyalahgunaan aset tetap milik daerah.

Pada indikator legal audit aset daerah menunjukkan bahwa nilai persentase total sebesar 68,81% dan nilai mean skor sebesar 3,44 termasuk ke dalam kategori baik. Nilai mean skor tertinggi sebesar 3,82, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa Pemerintah Daerah dalam hal ini sebagai besar sudah menindaklanjuti berbagai proses penyelesaian masalah legalitas aset tetap milik daerah. Hal tersebut terlihat dari banyaknya proses sertifikasi yang dilakukan pemerintah daerah terhadap kepemilikan aset tetap milik daerah. Nilai mean skor terendah sebesar 3,06, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa masih belum optimalnya penyelesaian kasus inventarisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah terkait masalah pengalihan aset milik pemerintah daerah yang dikuasai oleh pihak lain. Hal tersebut terlihat belum semua aset dilakukan sertifikasi karena berbagai masalah seperti halnya banyaknya aset daerah, status kepemilikan (sengketa), dan lain sebagainya.

Pada indikator penilaian aset daerah menunjukkan bahwa nilai persentase total sebesar 61,33% dan nilai mean skor sebesar 3,07 termasuk ke dalam kategori cukup baik. Nilai mean skor tertinggi sebesar 3,10, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa penilaian penyusutan aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sudah dilakukan secara akurat dan transparan. Meskipun penilaian penyusutan aset tetap hanya dilakukan pada aset yang sudah tercatat dan tersertifikasi sebagai milik pemerintah daerah. Nilai mean skor terendah sebesar 3,04, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa penilaian aset tetap daerah yang dilakukan pemerintah daerah belum semuanya dilakukan secara akurat dan transparan. Hal ini dikarenakan masih banyaknya aset tetap milik daerah yang belum tercatat dikarenakan faktor banyaknya aset yang tersebut diberbagai lokasi, banyaknya aset yang belum tersertifikasi, proses permasalahan (sengketa) kepemilikan aset tetap, dan lain sebagainya.

Pada indikator optimalisasi aset daerah menunjukkan bahwa nilai persentase total sebesar 59,11% dan nilai mean skor sebesar 2,96 termasuk ke dalam kategori cukup baik. Nilai mean skor tertinggi sebesar 3,08, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pengklasifikasikan aset tetap milik daerah untuk mengetahui aset tetap yang memiliki potenesi untuk dikembangkan dan dikelola. Pemanfaatan aset tetap daerah yang memiliki potensi dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik dan optimal oleh pemerintah daerah guna menambah pendapatan daerah atas pengelolaan aset tetap daerah. Nilai mean skor terendah sebesar 2,83, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan aset tetap milik daerah dengan optimal dalam memberikan nilai tambah terhadap pendapatan daerah belum dilakukan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih banyaknya aset tetap milik daerah seperti tanah yang masih mengangur atau tidak dimanfaatkan seperti halnya disewakan untuk perkebunan, pertanian, indsutri atau lain sebagainya.

Pada indikator pengawasan dan pengendalian aset daerah menunjukkan bahwa nilai persentase total sebesar 68,44% dan nilai mean skor sebesar 3,42 termasuk ke dalam kategori baik. Nilai mean skor tertinggi sebesar 3,80, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) memudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aset tetap milik daerah. Sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dapat digunakan untuk menyusun daftar aset tetap milik daerah, sehingga dengan adanya informasi tersebut memudahkan dalsahsatunya bagi APIP (Inspektorat) dalam melakukan pengawasan dan pengendalian aset daerah. Nilai mean skor terendah sebesar 3,04, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa aktivitas pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melakukan pengecekan antara catatan dengan bukti

fisik aset tetap milik daerah belum secara optimal dan secara periodik. Hal ini terlihat dari masih banyaknya aset tetap milik daerah yang belum tercatat, serta belum dilakukan sertifikasi atas kepemilikan aset tetap milik daerah.

3.2.3. *Pembahasan Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat*

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP No 71 Tahun 2010). Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari 11 butir pernyataan yang terbagi ke dalam 4 indikator yaitu indikator relevan terdiri dari 4 pernyataan, indikator andal terdiri dari 3 pernyataan, indikator dapat dibandingkan terdiri dari 2 pernyataan, dan indikator dapat dipahami terdiri dari 2 pernyataan.

Hasil penelitian secara keseluruhan pada variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa nilai total skor aktual sebesar 5.034, nilai total skor ideal sebesar 7425, nilai total persentase sebesar 67,80%, dan nilai total mean skor sebesar 3,39 termasuk dalam kategori cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan yang ditunjukkan Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat termasuk ke dalam kategori cukup baik.

Pada indikator relevan menunjukkan bahwa nilai persentase total sebesar 65,48% dan nilai mean skor sebesar 3,27 termasuk ke dalam kategori cukup baik. Nilai mean skor tertinggi sebesar 3,89, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa pemerintah daerah menjadikan laporan keuangan tahun sebelumnya sebagai alat untuk memprediksi kinerja di masa depan dan sebagai bahan dalam membuat perencanaan untuk kedepannya. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk memprediksi kondisi salahsatunya dalam aspek keuangan untuk dijadikan dasar dalam membuat perencanaan atas program-program pemerintah daerah kedepannya. Nilai mean skor terendah sebesar 3,04 artinya mayoritas responden beranggapan bahwa pemerintah daerah belum secara optimal dalam memanfaatkan laporan keuangan tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi dan koreksi dalam mengambil keputusan untuk meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut terlihat dari masih kurang optimalnya kinerja pemerintah daerah seperti halnya dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset daerah. Selain itu juga terlihat dari laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah masih banyak yang belum memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Masih banyaknya pemerintah daerah yang belum mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah dikarenakan adanya banyaknya permasalahan yang terjadi di pemerintah daerah yang belum terselesaikan seperti halnya masalah pengelolaan keuangan daerah atau pengelolaan aset tetap daerah.

Pada indikator andal menunjukkan bahwa nilai persentase total sebesar 70,67% dan nilai mean skor sebesar 3,53 termasuk ke dalam kategori baik. Nilai mean skor tertinggi sebesar 3,90, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disajikan secara jujur dan andal bebas dari adanya kesalahan material. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sudah disajikan secara jujur tanpa adanya indikasi kecurangan yang bersifat material. Nilai mean skor terendah sebesar 2,85, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah terkadang masih adanya yang tidak menunjukkan kesimpulan yang sama apabila diuji dan diverifikasi lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda. Hal tersebut dapat dikarenakan masih adanya kesalahan pencatatan ya dalam laporan keuangan, sehingga ketika diuji atau diverifikasi ulang menunjukkan hasil yang berbeda.

Pada indikator dapat dibandingkan menunjukkan bahwa nilai persentase total sebesar 69,41% dan nilai mean skor sebesar 3,47 termasuk ke dalam kategori baik. Nilai mean skor tertinggi sebesar 3,90, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah dapat dijadikan alat perbandingan dengan informasi laporan keuangan pada tahun sebelumnya. Laporan keuangan periode berjalan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dengan laporan keuangan periode sebelumnya untuk dilakukan evaluasi, agar pemerintah daerah dapat melakukan koreksi dan perbaikan atas kinerja pemerintah daerah kedepannya, serta dapat memperbaiki penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan guna mendapatkan opini WTP. Nilai mean skor terendah sebesar 3,04, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa masih adanya laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah yang belum secara konsisten dalam menyajikan dan mengklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Hal ini dapat dikarenakan kurangnya pemahaman akuntansi pada pegawai bagian keuangan sehingga masih terjadinya kesalahan dan ketidakkonsistenan dalam pencatatan transaksi dan mengklasifikasi ke dalam pos-pos akun dalam laporan keuangan.

Pada indikator dapat dipahami menunjukkan bahwa nilai persentase total sebesar 66,52% dan nilai mean skor sebesar 3,32 termasuk ke dalam kategori cukup baik. Nilai mean skor tertinggi sebesar 3,80, artinya mayoritas responden

beranggapan bahwa laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Hal ini bertujuan memudahkan para pengguna laporan keuangan dapat membaca dan menilai laporan keuangan pemerintah daerah. Nilai mean skor terendah sebesar 2,85, artinya mayoritas responden beranggapan bahwa masih adanya laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah yang terkadang menggunakan istilah yang sulit dipahami. Adanya istilah yang sulit dipahami oleh pengguna laporan keuangan dapat menyebabkan para pengguna salah dalam pengambilan keputusan.

3.2.4. Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Besarnya pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 32,8%. Hasil penelitian ini didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dari seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Elsye, 2016:2). Laporan pertanggungjawaban menjadi salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Oleh karena itu penting bagi pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Maka untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah daerah harus berupaya untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (Soleh & Rohmansjah, 2014, p. 67).

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/122/BAKD Tahun 2008 menyebutkan tujuan utama program sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah mengembangkan, menginstalasikan, dan mengimplementasikan aplikasi keuangan daerah berdasarkan *international best practice* komputerisasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Melalui penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mempermudah pemerintah untuk mengelola keuangan di daerahnya dengan efektif, efisien, dan ekonomis serta dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang andal dan relevan. Semakin tinggi penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu alat pengendalian pemerintah daerah dan merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan kualitas implementasi berbagai regulasi bidang pengolahan keuangan daerah. Oleh karena itu perlu didukung dengan penyempurnaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien guna menghasilkan laporan informasi keuangan dengan akurat dan tepat waktu. Jadi semakin tinggi efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan ((Yusup, 2016). Penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan berpengaruh pada peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Lestari & Hastuti, 2020). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Mimba, 2014), (Yusup, 2016), dan (Lestari & Hastuti, 2020). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.2.5. Pengaruh Pengelolaan Aset Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Besarnya pengaruh pengelolaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 32,2%. Hasil penelitian ini didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelolaan aset adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Salah satu aset yang dikelola oleh pemerintah daerah yaitu aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (Indonesia, 2009). Pengelolaan aset bertujuan untuk membantu suatu organisasi dalam memenuhi tujuan penyediaan pelayanan secara efektif dan efisien. Meliputi petunjuk cara perancangan aset, pengoperasian/penggunaan aset sampai pada penghapusan aset serta risiko yang mungkin ada selama siklus hidup aset (Yusuf, 2015:198).

Pemerintah daerah dalam hal ini harus serius dalam mengelola aset. Apalagi aset terkait dengan bagaimana cara mengelola aset tetap, agar aset tetap tersebut terinventarisir, ternilai, tersajikan serta terungkap sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kegiatan inventarisasi aset dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Mengacu pada prinsip *good governance* bahwa pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Tujuannya agar semua yang dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat termasuk aset tetap berupa barang milik daerah (BMD). Semakin baik pengelolaan aset daerah, maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Anshari dan Syofyan, 2016).

Penatausahaan/pencatatan barang daerah sangat penting dikarenakan catatan tersebut dijadikan objek audit oleh BPK dalam meyakini penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Melalui penatausahaan secara tertib, maka akan dihasilkan angka-angka yang tepat dan akurat yang berdampak pada tersedianya *database* yang memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta akan menghasilkan laporan aset dineraca dengan angka yang tepat dan akurat sehingga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik (Poe et al., 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sundari (2018), Poe dkk (2017), Anshari dan Syofyan (2016), (Ramli, 2014), Lestari (2016), dan (CAESARINA, 2017). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.2.6. Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Aset Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Besarnya pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 65,0%. Hasil penelitian ini didukung oleh landasan teori pada pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2016:159).

Laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Kriteria dan unsur-unsur pembentuk kualitas informasi yang menjadikan informasi dalam laporan keuangan pemerintah mempunyai nilai atau manfaat yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Beberapa faktor yang menyebabkan laporan keuangan pemerintah daerah tidak mendapatkan opini WTP diantaranya dikarenakan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap daerah. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900/122/BAKD Tahun 2008 menyebutkan tujuan utama program sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah mengembangkan, menginstalasikan, dan mengimplementasikan aplikasi keuangan daerah berdasarkan *international best practice* komputerisasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah. Melalui penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat mempermudah pemerintah untuk mengelola keuangan di daerahnya dengan efektif, efisien, dan ekonomis serta dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang andal dan relevan. Semakin tinggi penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan salahsatu alat pengendalian pemerintah daerah dan merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam meningkatkan kualitas implementasi berbagai regulasi bidang pengolahan keuangan daerah. Oleh karena itu perlu didukung dengan penyempurnaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien guna menghasilkan laporan informasi keuangan dengan akurat dan tepat waktu. Jadi semakin tinggi efektivitas penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan (Yusup, 2016). Penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang diterapkan berpengaruh pada peningkatan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Lestari dan Hastuti, 2020).

Selain sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset tetap daerah juga menjadi faktor penting dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini harus serius dalam mengelola aset. Apalagi aset terkait dengan bagaimana cara mengelola aset tetap, agar aset tetap tersebut

terinventarisir, ternilai, tersajikan serta terungkap sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kegiatan inventarisasi aset dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Mengacu pada prinsip *good governance* bahwa pemerintah daerah harus menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Tujuannya agar semua yang dilaporkan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat termasuk aset tetap berupa barang milik daerah (BMD). Semakin baik pengelolaan aset daerah, maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Anshari dan Syofyan, 2016).

Penatausahaan/pencatatan barang daerah sangat penting dikarenakan catatan tersebut dijadikan objek audit oleh BPK dalam meyakini penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Melalui penatausahaan secara tertib, maka akan dihasilkan angka-angka yang tepat dan akurat yang berdampak pada tersedianya *database* yang memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta akan menghasilkan laporan aset dineraca dengan angka yang tepat dan akurat sehingga akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang lebih baik (Poe dkk, 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lestari (2016). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Besarnya pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 32,8%. Pengelolaan aset tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Besarnya pengaruh pengelolaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 32,2%. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Besarnya pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 65,0%.

References

- Anshari, A., & Syofyan, E. (2016). Pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah kota Padang. *Jurnal Riset Manajemen Bisnis Dan Publik*, 4(1).
- Baldrick, S. (2015). *Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*.
- CAESARINA, P. (2017). *JUAL BELI RUMAH TOKO YANG DIBANGUN OLEH PERSEORAN TERBATAS YANG BERKEPASTIAN HUKUM*. Universitas Airlangga.
- Elsye, R., Suwanda, D., & Muchidin, U. (2016). *Dasar-dasar akuntansi akrual pemerintah daerah*. Ghalia Indonesia.
- Fatimah, S. (2019). *Tiga Kabupaten di Jabar Gagal Raih Opini WTP*. Tribun Jabar. <https://jabar.tribunnews.com/2019/06/21/tiga-kabupaten-di-jabar-gagal-raih-opini-wtp>
- Gimnastiar, S. (2021). *Bandung Barat Mulai Benahi Aset*. <https://www.bandungbaratpos.com/bandung-barat-mulai-benahi-aset/>.
- Gunawan, D. (2020). *Mangkrak 10 Tahun, Korupsi Kantor Pemkab Bandung Siap Sidang*. <https://mediaindonesia.com/nusantara/319714/mangkrak-10-tahun-korupsi-kantor-pemkab-bandung-siap-sidang.html>
- Indonesia, I. A. (2009). Pernyataan standar akuntansi keuangan. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Lestari, S. F., & Hastuti, H. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*, 11(1), 820–827.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.

- Mimba, N. P. S. H. (2014). Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 8(3), 442–457.
- Nasir, H. (2020). *Pemkab Bandung Barat Terima Opini WTP, DPRD: Masih Banyak PR yang Harus Diselesaikan*. <https://www.bandungbaratpos.com/2020/06/30/pemkab-bandung-barat-terima-opini-wtp-dprd-masih-banyak-pr-yang-harus-diselesaikan/>
- Pemerintah, R. I. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang. *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Poae, Y., Ilat, V., & Warongan, J. (2017). Pengaruh pengelolaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten kepulauan talaud. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 8(1).
- Ramli, M. R. (2014). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Aceh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Aceh). *SI-MEN (Akuntansi Dan Manajemen) STIES*, 4(2), 84–103.
- Ratifah, I., & Ridwan, M. (2014). Komitmen organisasi memoderasi pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Trikonomika Journal*, 11(1), 29–39.
- Sari, C. W. (2018). *APBD Bandung Barat Sisa Rp 304 Miliar, Serapan Anggaran Jadi Sorotan*. Pikiran Rakyat. <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01299441/apbd-bandung-barat-sisa-rp-304-miliar-serapan-anggaran-jadi-sorotan-427627>
- Sari, C. W. (2019). *Ribuan Aset Belum Bersertifikat, Pemkab Bandung Barat Sulit Beroleh WTP*. Pikiran Rakyat. <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01308652/ribuan-aset-belum-bersertifikat-pemkab-bandung-barat-sulit-beroleh-wtp>.
- Soleh, C., & Rohmansjah, H. (2014). *Pengelolaan keuangan desa*. Fokusmedia.
- Sundari, R. (2018). PENGARUH PENGELOLAAN ASET TETAP TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 114–124.
- Yusuf, M. (2010). *Delapan Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusup, M. (2016). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship (e-Journal)*, 10(2).